

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan menjadi aset terpenting bagi makhluk hidup di bumi dimana seiring meningkatnya pembangunan dan penambahan penduduk, sumber daya alam akan terus terbatas dan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Permasalahan lingkungan bukan lagi menjadi masalah baru di dunia, terjadinya kerusakan lingkungan banyak disebabkan dari aktivitas manusia yang mengeksploitasi alam besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya akan memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Jur, 2008: 1)

Secara garis besar lingkungan hidup yang kompleks dilihat secara utuh satu kesatuan komponen lain karena semua komponen kehidupan tersebut saling berinteraksi, saling mempengaruhi dan saling terkait. Tanpa manusia, pada dasarnya organisme lain dan lingkungannya dapat berubah secara alami dengan bercirikan keajegan, keselarasan, dan keseimbangan. Dalam ilmu lingkungan ada masalah benar atau salah, atau dengan kata lain ilmu lingkungan adalah ekologi ditambah dengan pertimbangan moral benar atau

salah. Hal itu, menjadi dasar apakah manfaat dan resiko dari perbuatan atau kegiatan manusia bagi diri sendiri maupun orang lain, serta makhluk hidup lainnya (Soerjani dalam Ria, 2012: 10)

Berunjuk dari masalah tersebut erat kaitannya dengan prinsip etika lingkungan yang menurut Sony Keraf, dipahami sebagai disiplin ilmu yang berbicara mengenai norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam tersebut. Kendatinya etika lingkungan ini membicarakan pandangan pada segi antroposentris yang dewasanya adalah nilai atau prinsip moral yang berlaku bagi manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting. Segala tuntutan itu manusia memiliki hak istimewa dalam mengeksploitasi alam sebagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya untuk dirinya, dan orang lainnya.

Menurut Sonny Keraf dalam Supriadi (2010: 26), bahwa berbagai kasus lingkungan yang terjadi saat ini, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri. Kesalahan cara pandang manusia terletak pada perilaku manusia terhadap alam merupakan dasar masalah krisis ekologi. Manusia keliru memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta. Bersumber dari paradigma etika antroposentris yang mengatakan manusia adalah pusat dari segalanya. Manusia dianggap berbeda dengan makhluk hidup lain di bumi dan hanya manusia yang merupakan

pelaku moral yang memiliki akal budi dapat bertindak secara bebas dalam mengeksploitasi.

Salah satu perilaku manusia yang tidak dapat terkendalikan adalah ekspansi (perluasan) pembukaan lahan untuk pembangunan perumahan oleh pihak-pihak perusahaan maupun masyarakat pribadi. Ekspansi pembangunan terjadi akibat dari perubahan, kompleksitas dan ketidakpastian bahwa lingkungan harus siap menghadapi perkembangan perubahan sistem sosial, ekonomi dan politik yang berkompleksitas pada dampak kegiatan manusia terhadap alam yang mengalami ketidakpastian dalam pengambilan keputusan oleh kebijakan pemerintah.

Bangka Belitung salah satu provinsi yang sedang aktif dalam kegiatan pembangunan daerah dengan banyaknya pembukaan lahan perumahan. Mengingat tingginya pertambahan penduduk di Bangka Belitung sehingga ekspansi lahan di kawasan perbukitan menjadi ancaman pembangunan. Kabupaten Bangka juga berpotensi pada meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Bersumber dari data BPS Kabupaten Bangka tercatat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bangka mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 mencapai 317.735 penduduk dengan LLP 2,14% sementara di tahun sebelumnya 2015 tercatat 311.085 penduduk dengan LLP 2,17%.

Kebijakan pemerintah sendiri sangat tegas dalam menanggapi masalah kerusakan lingkungan bahwa pembangunan kehutanan akan terjamin terkendali dan aman apabila diawasi oleh negara yang mengaturnya.

Pengawasan oleh negara telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut pasal 1 mencantumkan pengertian apa yang dimaksudkan dengan kearifan lokal, masyarakat hukum adat, instrumen ekonomi, izin lingkungan dan pengertian pemerintah serta pemerintah daerah. Sementara pada Pasal 1 butir 35 UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan yang wajib Amdal atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat izin pembangunan (Ria, 2012: 79 - 80).

Didalam Undang-Undang Lingkungan Hidup terdapat juga ketentuan pidana yang mengandung rumusan delik. Rumusan Delik dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 19 ayat 1 adalah setiap orang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan Pasal 33 ayat 1 bahwa melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional (Jur, 2008: 111)

Sehubungan pada lahan dalam proses perizinan kegiatan pembangunan dari segi bangunan, perumahan, atau tempat tinggal di dalam kawasan bagaimanapun tentunya telah diatur dalam UU No 28 tahun 2002 pada BAB IV Pasal 7 menjelaskan pengertian bahwa setiap bangunan memiliki izin administratif (www.hukumonline.com). Oleh karena itu, pembangunan daerah yang maju juga memperhatikan tata ruang wilayah dalam hubungan kesinambungan antara kawasan ruang terbuka hijau maupun ruang

permukiman. Potensi lahan tentunya menjadi faktor segala penunjang relasi manusia dan lingkungan alam sehingga perlunya keseimbangan antara kedua aspek tersebut.

Berdasarkan kontroversi ekspansi pembangunan perumahan, Sungailiat adalah lokasi yang banyak ditemukan aktivitas pembukaan lahan yang bertumpang tindih pada kawasan taman nasional di Bukit Siam. Sebelumnya Bukit Siam telah dijadikan kawasan Taman Nasional Keanekaragaman Hayati sebagai bentuk pelestarian hutan dalam keseimbangan ekosistem lingkungan. Karena perkembangan dan pembangunan daerah yang kian marak terjadi di lingkungan Bukit Siam terancam mengalami ekspansi pembukaan lahan sebagai indikator pembangunan tersebut. Semua itu terjadi karena pengaruh pertumbuhan penduduk dan pembangunan daerah memicu ekspansi lahan bukit yang dilakukan oleh manusia sangat dengan mudah mengambil langkah ekspansi tersebut tanpa harus berpikir panjang dampak apa yang akan ditimbulkan nantinya.

Tindakan kebebasan perilaku manusia pada alam tidak adanya rasa peduli pada makhluk hidup lain dimana lebih mengesampingkan hak-hak alam. Hak alam merupakan aset terpenting untuk keberlangsungan lingkungan hidup yang didalamnya meningkatkan sumber daya alam bagi kebutuhan manusia. Selain itu juga, akan menimbulkan dampak pada generasi selanjutnya dan lingkungan sekitar yang juga membutuhkan peranan fungsi untuk kehidupan. Masyarakat sekitaran Bukit Siam juga sangat

terancam apabila keadaan lingkungan bukit tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya akan berdampak pada sosial dan ekonomi.

Untuk itu, adanya keinginan yang kuat bagi peneliti untuk mengangkat fokus permasalahan ini untuk mengkaji lebih dalam lagi dengan melihat bagaimana etika lingkungan memandang pada ekspansi pembukaan lahan di lingkungan Bukit Siam. Sebabnya, karena pertumbuhan penduduk dan pembangunan daerah yang terjadi pada kota Sungailiat perlu menerapkan analisis tersebut.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan masalah pada prinsip analisis etika lingkungan terhadap ekspansi pembukaan lahan untuk pembangunan perumahan di kawasan Bukit Siam oleh perusahaan. Hasilnya akan ditemukan perilaku manusia (perusahaan) dalam ekspansi lahan Bukit Siam tanpa memperhatikan Bukit tersebut sebagai kawasan Taman Nasional Keanekaragaman Hayati dan lingkungan hidup disekitaran bukit. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik suatu permasalahan:

1. Bagaimana gambaran bentuk pengelolaan lingkungan yang terjadi di Kelurahan Bukit Betung?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingginya ekspansi pembukaan lahan perumahan di kawasan Bukit Siam Kabupaten Bangka?
3. Bagaimana analisis etika lingkungan dalam memandang permasalahan ekspansi pembukaan lahan perumahan di kawasan Bukit Siam Kabupaten Bangka?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini diadakannya adalah:

1. Mengetahui faktor-faktor ekspansi pembukaan lahan pembangunan di kawasan Bukit Siam Kabupaten Bangka.
2. Mendeskripsikan secara mendalam terkait permasalahan lingkungan pada ekspansi pembukaan lahan pembangunan berdasarkan cara pandangan etika lingkungan.

D. Manfaat

Adapun manfaat yang dapat dipetik dalam penelitian Analisis Etika Lingkungan terhadap Ekspansi Pembukaan Lahan Perumahan di Kawasan Bukit Siam sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengembangan disiplin ilmu khususnya sosiologi lingkungan terkait dengan teori Etika Lingkungan dalam menganalisis etika manusia terhadap lingkungan yaitu masalah ekspansi pembukaan lahan di Kawasan Bukit Siam Kabupaten Bangka.
 - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis ekspansi pembukaan lahan sebagai kajian etika lingkungan.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pemerintah dan masyarakat terkait dengan masalah etika lingkungan dalam mendukung perilaku manusia untuk peduli terhadap lingkungan hidup.
- b. Diharapkan mampu memberikan panduan bagi penentu kebijakan dan regulasi tetap membangun pembangunan yang berwawasan lingkungan antara keseimbangan ekosistem.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian untuk mengkaji Analisis Etika Lingkungan Terhadap Ekspansi Pembukaan Lahan Perumahan di Kawasan Bukit Siam, akan peneliti cantumkan beberapa penelitian yang terkait dengan masalah etika lingkungan. Penelitian pertama dilakukan oleh Jeffery Jeremias (2010) dalam skripsi yang berjudul “*Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Gerakan Ecosophy*”. Penelitian ini membahas mengenai paradigma pembangunan berkelanjutan berbasis *ecosophy*. *Ecosophy* disini merupakan sebuah counter paradigma sebelumnya, antroposentrisme yang mengedepankan manusia sebagai tujuan utama. Orientasi pembangunan berkelanjutan berbasis *ecosophy* arah kebijakan pembangunan tidak lagi mengedepankan keberlanjutan materi ataupun keberlanjutan manusia berkala, melainkan mengedepankan keberlanjutan ekologis dan keadilan ekologis. *Ecosophy* turut membawa manusia pada pemahaman akan hak alam, kesatuan ekologis, dan gerakan baru dalam mengatur kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan hermeneutika. Peneliti memberikan gambaran mengenai masalah krisis ekologi dikaitkan dengan pemikiran Arne Naess mengenai *ecosophy* kaitannya dengan pola pembangunan berkelanjutan dari berbagai sumber, sekaligus memberikan interpretasi baru tentang *ecosophy* melalui metode hermeneutika.

Hasil penelitian ini memaparkan kerusakan lingkungan terjadi adanya faktor penyebab dan indikator yang menyebabkan alam menjadi krisis. Faktor tersebut adalah paradigma antroposentrisme sebagai acuan yang paling berpengaruh. Hal itu dikarenakan lewat paradigma tersebut timbul berbagai pandangan mengenai perilaku manusia terhadap eksploitasi alam secara besar. Paradigma antroposentris merupakan salah satu pengaruh dalam krisis lingkungan secara berkelanjutan. Permasalah itu memandang manusia tidak lagi mementingkan generasi mendatang yang akan menempati bumi ini, mereka hanya mementingkan waktu sekarang dimana mereka hidup. Prinsip yang dipegang dalam menyelesaikan masalah lingkungan adalah diperlukannya prinsip *ecosophy*. *Ecosophy* merupakan peranan manusia dalam mengontrol tindakannya dalam berelasi dengan alam. Maka hal itu sikap manusia di arahkan untuk peduli dan menghargai lingkungan serta melakukan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengedepankan keseimbangan ekosistem bahwa alam memiliki hak-hak yang sama untuk bertahan hidup.

Hasil penelitian ini juga menyimpulkan yang *pertama*, masalah awal dari ketidakharmonisan manusia dengan alam terlahir pada cara pandang antroposentrisme. *Kedua*, etika lingkungan yang digunakan pada teori *deep ecology* merealisasikan lewat tindakan praktis berupa pola pembangunan memberikan pemahaman pada pembangunan berkelanjutan dengan prinsip keberlanjutan ekologi. Pembangunan berkelanjutan berbasis gerakan *ecoshopy* terdapat dalam hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya dalam etika lingkungan yaitu (1) perlunya hubungan timbal balik yang harmonis dan saling menguntungkan satu sama lain. Manusia tidak lagi eksklusif dalam berelasi dengan alam, mengingat keterbatasan sumber daya alam yang ada. (2) Adanya keadilan ekologis memberikan ruang kepada makhluk hidup untuk berkembang secara alami dan memberikan batasan gerak pada manusia untuk menggunakan alam. (3) peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai pengendali kebijakan, harus mampu mengontrol pertumbuhan penduduk, mengontrol arah pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan politik lingkungan.

Setelah melakukan tinjauan penelitian Jeffery (2010), terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu persamaan meliputi analisis mengenai permasalahan etika lingkungan yang terlihat pada proses perilaku manusia dalam mengeksploitasi alam yang dipandang berdasarkan paradigma antroposentrisme. Manusia adalah sebagai makhluk yang rasional dan diperbolehkan secara moral untuk menggunakan alam. Bersumber dari perilaku manusia yang kurang menghormati alam dikarenakan adanya

tumpang tindih antara pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga perilaku itu tanpa disadari membuat manusia kurang menghargai lingkungan hidupnya.

Selanjutnya penelitian yang dijadikan rujukan pustaka penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah Rosmanto Nata (2010), dengan skripsi yang berjudul "*Dampak Sosial Ekonomi Akibat Kebijakan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Tentang Masyarakat Adat Suku Lom Kabupaten Bangka)*". Dalam penelitian membahas mengenai kebijakan pemerintah berlandaskan pada sosial kemasyarakatan. Diperlukan upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Sebelum menetapkan kebijakan pemerintah harus mengetahui dampak sosial ekonomi dari kebijakan yang telah ditetapkan, terlepas apakah itu berdampak negatif atau positif bagi masyarakat. Permasalahan penelitian ini adalah dampak sosial-ekonomi akibat kebijakan ekspansi perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat Adat Suku Lom di Dusun Pejem.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari ekspansi perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat Adat Suku Lom. Peneliti melakukan pengamatan dan wawancara secara mendalam untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diangkat. Pengamatan di lokasi penelitian, peneliti bertindak sebagai partisipasi aktif yang melibatkan diri secara langsung, dengan berinteraksi dan beraktivitas dengan tinggal beberapa minggu bersama masyarakat setempat. Teknik analisa yang

digunakan adalah teknik kualitatif dengan pendekatan interpretasi dikenal dalam istilah bahasa Jerman “Verstehen” atau pemahaman berusaha untuk menjelaskan makna dari tindakan, sedangkan sebagai jembatan penghubung hingga tercapainya hasil penelitian, peneliti menggunakan teori kritis Habermas *A Theory of Communicative Action (TCA)* terkait komunikasinya.

Temuan penelitian Nata menyimpulkan bahwa 1) terdapat masyarakat pro sebagai masyarakat atas dan golongan kontra adalah masyarakat bawah. 2) adanya ketidaksetujuan masyarakat dikarenakan masalah ganti rugi lahan yang tidak wajar dan pemerintah dan pihak perusahaan yang tidak transparan. 3) dilihat dari beberapa indikator dampak yang ditimbulkan; *pertama*, pola hidup masyarakat setempat berubah menjadi konsumtif hanya ingin memakai/menghabiskan daripada menghasilkan karena lahan yang tidak tersedia; *kedua*, sedikit meningkatnya penghasilan masyarakat Adat Suku Lom berpendapatan pada perkebunan kelapa sawit milik PT. GPL, jika masyarakat memiliki pekerjaan sampingan; *ketiga*, cara berfikir, masyarakat yang kesehariannya bekerja sebagai petani dan nelayan, dengan adanya perkebunan kelapa sawit, masyarakat memiliki wawasan untuk mengelola perkebunan kelapa sawit; *keempat*, karena adanya perkebunan kelapa sawit PT. GPL menyebabkan adat istiadat yang telah terbentuk mengalami pemudaran. Terlihat dari pelanggaran-pelanggaran masyarakat tentang hal-hal yang dilarang; *kelima*, dengan adanya perkebunan kelapa sawit masyarakat adat sekarang berubah menjadi tenaga buruh perkebunan dikarenakan lahan yang tidak tersedia lagi.

Adapun kesamaan penelitian milik Rosmanto Nata (2010) dengan penelitian milik peneliti yakni kedua penelitian ini adalah penelitian kualitatif pendekatan deskriptif analisa untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah dampak ekspansi. Kemudian kedua penelitian ini sama-sama melakukan pengamatan dan wawancara secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang terkait. Persamaan masalah penelitian membahas masalah ekspansi yang menggunakan teknik analisis yang menjelaskan makna tindakan dan penelitian ini menjelaskan adanya permasalahan dampak ekspansi yang tidak lagi menjadi kekuatan mutlak serta dilihat pelanggaran-pelanggaran tentang hal-hal yang dilarang atas pembukaan lahan.

Selain terdapat kesamaan, kedua penelitian ini memiliki perbedaan terutama pada fokus objek permasalahannya. Penelitian Nata menggunakan ekspansi perkebunan kelapa sawit sebagai objek penelitiannya. Dalam hal ini penelitian Nata membahas mengenai teori kritis tindakan komunikatif Habermas yang digunakan untuk menjembatani relasi komunikasi atas kebijakan pemerintah dengan indikasi partisipasi masyarakat setempat. Secara khususnya dalam penelitian milik peneliti menyinggung sedikit mengenai fenomena ekspansi (perluasan) lahan akibat dari perkembangan pembangunan yang berimplikasi terhadap pembukaan lahan hutan akibat dari perubahan perilaku manusia demi kepentingan kebutuhan manusia.

Kemudian menurut penelitian Rifky Riswan Tanjung (2015), dengan judul skripsi “Analisis Kritis Industrialisasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gunung Pelawan Lestari Di Tanah Adat Orang Lom Dusun Air Abik” yang

membahas mengenai persoalan pembukaan industri yang tentu tidak dapat melupakan kelompok masyarakat adat, maka pertimbangan untuk kegiatan industri harus mampu beradaptasi dengan kondisi sosial -budaya masyarakat di dalamnya melalui komunikasi yang bebas penindasan. Teori dalam penelitian ini adalah teori kritis tindakan komunikatif untuk menganalisa secara kritis dinamika struktur komunikasi sosial antara pemerintah dan masyarakat adat, serta mengidentifikasi dampak sosial – budaya pada dinamika komunikasi dalam industrialisasi tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan *verstehen* yang bertujuan untuk memahami dinamika komunikasi. Analisa data *verstehen* digunakan untuk menginventarisir objek material berupa data empiris meliputi gejala apa yang terjadi dalam proses komunikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika dalam proses pembukaan industri terlihat pada permasalahan komunikasi yang tidak setara antara pemerintah, perusahaan dan Orang Lom Dusun Air Abik. Proses itu adalah sosialisasi melibatkan masyarakat, mekanisme pembebasan tanah, dan pemenuhan aspirasi Orang Lom. Komunikasi yang berjalan tidak menggunakan komunikasi ideal, dan yang mengedepankan kepercayaan atau rasa saling percaya (*trust*), kejujuran dan *fairness*, dan tanggung jawab sosial. Dampak akibatnya pada dinamika sosial budaya masyarakat adat Orang Lom, yaitu fragmentasi struktur sosial melalui perubahan persepsi atas fungsi tanah, kompetensi penjualan tanah, krisis kepercayaan, dan melahirkan krisis ekologi hutan.

Kesamaan pada penelitian Tanjung (2015) yaitu terdapat pada fokus permasalahan yang menyinggung pembukaan lahan yang terdapat adanya pengaruh dampak sosial, budaya pada masyarakat serta permasalahan lahan yang melahirkan krisis ekologi hutan. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah objek penelitian yang berbeda dimana penelitian Tanjung membahas dinamika struktur komunikasi dalam pemahaman mengenai pembukaan lahan industri kelapa sawit.

Penelitian lainnya yang juga relevan dijadikan tinjauan selanjutnya adalah penelitian Orient Abram (2013) dengan judul skripsi "*Efektivitas Class Action Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pangkal Pinang*". Penelitian ini membahas mengenai kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan produksi pabrik, industri dan pertambangan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat baik kerugian materil maupun immateril. Kerugian itu dapat diajukan dengan menggunakan mekanisme *class action*. Penyelesaian pelanggaran hukum atau sengketa yang merugikan secara serentak dan masal, dengan syarat memiliki fakta, dasar hukum dan tergugat yang sama. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas yaitu bagaimana prosedur beracara di peradilan perdata dalam perkara gugatan *class action* dan bagaimana efektivitas *class action* di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam sengketa lingkungan hidup.

Penelitian Orient Abram menggunakan metode penulisan adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan konseptual dan penelitian deskriptif. Penelitian hukum dilakukan dengan mewawancarai pihak yang terkait. Selain itu dilakukan studi kepustakaan yang meliputi semua data sekunder yang terdapat didalamnya peraturan perundang-undangan. Kemudian mengembangkan analisis dengan cara membangun konsep berpikir untuk menjawab permasalahan. Prosedur gugatan *class action* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan mengikuti prosedur hukum acara perdata yang diatur dalam HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan RBg (*Rechtsre Voor Buitengewested*). Dalam sengketa lingkungan hidup, gugatan *class action* belum efektif di Pangkalpinang, disebabkan oleh kebiasaan dan ketidaksadaran masyarakat tinggal di lingkungan tercemar didaerah pertambangan, perdagangan dan perindustrian. Adanya faktor timbal balik antara peningkatan taraf hidup dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan perindustrian yang menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat di kawasan ketapang.

Selain itu penelitian Abram juga menjelaskan peraturan perundangan-undangan yang telah diatur oleh seperangkat aturan bahwa manusia diberikan kekuasaan untuk mengelola alam dengan syarat dan prosedur. Kegiatan eksploitasi kekayaan alam bertujuan mendapatkan hasil agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, pengelolaan dilakukan

secara berlebihan mengakibatkan kerugian bagi sekelompok orang. Salah satu potensi kerusakan lingkungan di Bangka Belitung sebagai contoh PT. Bangka Timah Utama Sejahtera, PT. Sumber Jaya Indah, dan PT. Bangka Putra Karya adalah industri peleburan timah dan karet. Faktor-faktor itu salah satunya ketidaksadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan itu, penelitian Abram yang dianggap memiliki kesamaan penelitian dengan peneliti bahwa kedua-duanya menyinggung masalah lingkungan hidup terkait dengan peraturan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembahasan penelitian ini menjelaskan kegiatan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan hidup dimana masyarakat tidak sadar dalam memperhatikan masalah kerusakan lingkungan. Metode penulisan ini juga menggunakan penelitian deskriptif dan menggunakan teknik mewawancarai pada pihak terkait.

Rujukan penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan peneliti adalah terletak pada fokus permasalahannya. Penelitian Abram menjelaskan bagaimana prosedur beracara diperadilan perdata terhadap efektifitas class action berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pangkalpinang.

F. Kerangka Teoritis

Dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan teori sebagai alat untuk menganalisis permasalahan ini, maka peneliti menggunakan Teori Etika Lingkungan menurut Sony Keraf (2002), bahwa terdapat tiga model teori besar yaitu Antroposentrisme (*Shallow Environmental Ethics*), Biosentrisme (*Intermediate Environmental*) dan Ekosentrisme (*Deep Environmental Ethics*). Dalam hal ini untuk menganalisis krisis lingkungan kaitannya dengan ekspansi pembukaan lahan pembangunan perumahan adalah dengan menggunakan pemahaman dari Antroposentris yang dilihat sebagai sebuah teori filsafat dari Rene Descartes.

Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau masyarakat. kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Etika digunakan dalam bentuk kaidah, aturan atau norma secara lisan dalam masyarakat, sehingga dikenal, dipahami dan dilakukan masyarakat (Keraf, 2010 : 14)

Etika lingkungan sebagai sebuah disiplin filsafat yang berbicara mengenai hubungan moral antara manusia dengan lingkungan, dan bagaimana perilaku manusia yang seharusnya terhadap lingkungan. Disini, etika lingkungan dipahami sebagai disiplin ilmu mengenai norma dan kaidah moral

yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam serta prinsip moral yang menjwai perilaku manusia tersebut.

Shallow Environmental mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting. Dalam pemikiran Rene Descartes mengatakan manusia mempunyai tempat yang istimewa diantara semua makhluk hidup lain, karena manusia mempunyai jiwa dapat berpikir dan berkomunikasi dengan bahasa. Sebaliknya, binatang adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan dengan kedudukan manusia karena binatang tidak memiliki akal budi melainkan hanya mesin bergerak secara otomatis. Manusia menentukan apa yang ingin dilakukan dan memahami mengapa manusia melakukan tindakan tertentu. Demikian pula, manusia mampu mengkomunikasikan pikirannya dengan sesama manusia melalui bahasa. Kemampuan-kemampuan itu tidak ditemukan pada binatang, karena manusia dapat dengan bebas dan rasional dalam menggunakan alam untuk keperluan hidup dirinya maupun manusia lainnya (Sonny Keraf, 2002).

Menurut Sony Keraf, (2010: 48) menegaskan bahwa manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil yaitu berkaitan dengan alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapatkan perhatian khusus. Sementara alam semesta hanya mendapat nilai dan perhatian sejauh demi menunjang dan kepentingan manusia. Alam hanya sebagai alat bagi pencapaian tujuan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada

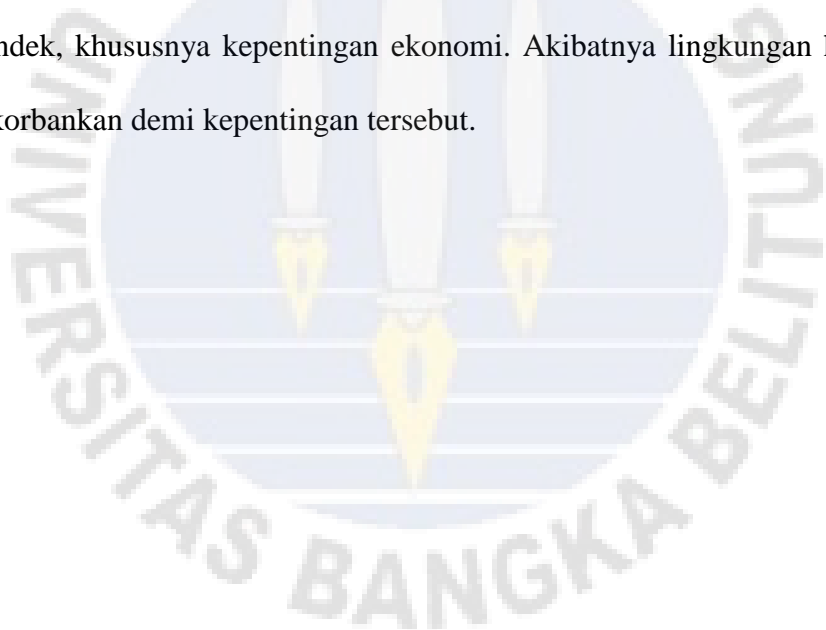
dirinya sendiri. Walaupun manusia mempunyai sikap peduli terhadap alam, itu semata-mata dilakukan untuk menjamin kebutuhan hidup manusia bukan karena pertimbangan bahwa alam mempunyai nilai pada diri sendiri sehingga pantas untuk dilindungi.

Sesungguhnya dapat disimpulkan bahwa etika antroposentrisme bersifat sangat instrumental, sebab pola hubungan manusia dan alam dilihat hanya dalam relasi instrumentalnya. Artinya berorientasi kepada alam tidak diletakkan sebagai tujuan tindakan sosial manusia, melainkan sebagai nilai alat kepentingan manusia. Kekayaan alam semesta yang ada di lingkungan hidup tidak lebih dipandang sebagai alat untuk menggapai kesejahteraan manusia. Wujud dari antroposentris dalam bentuk manusia yang berkarakter pembuka dan pendobrak lahan baru (*Frontier*) (Keraf dalam Rachmad, 2012: 61).

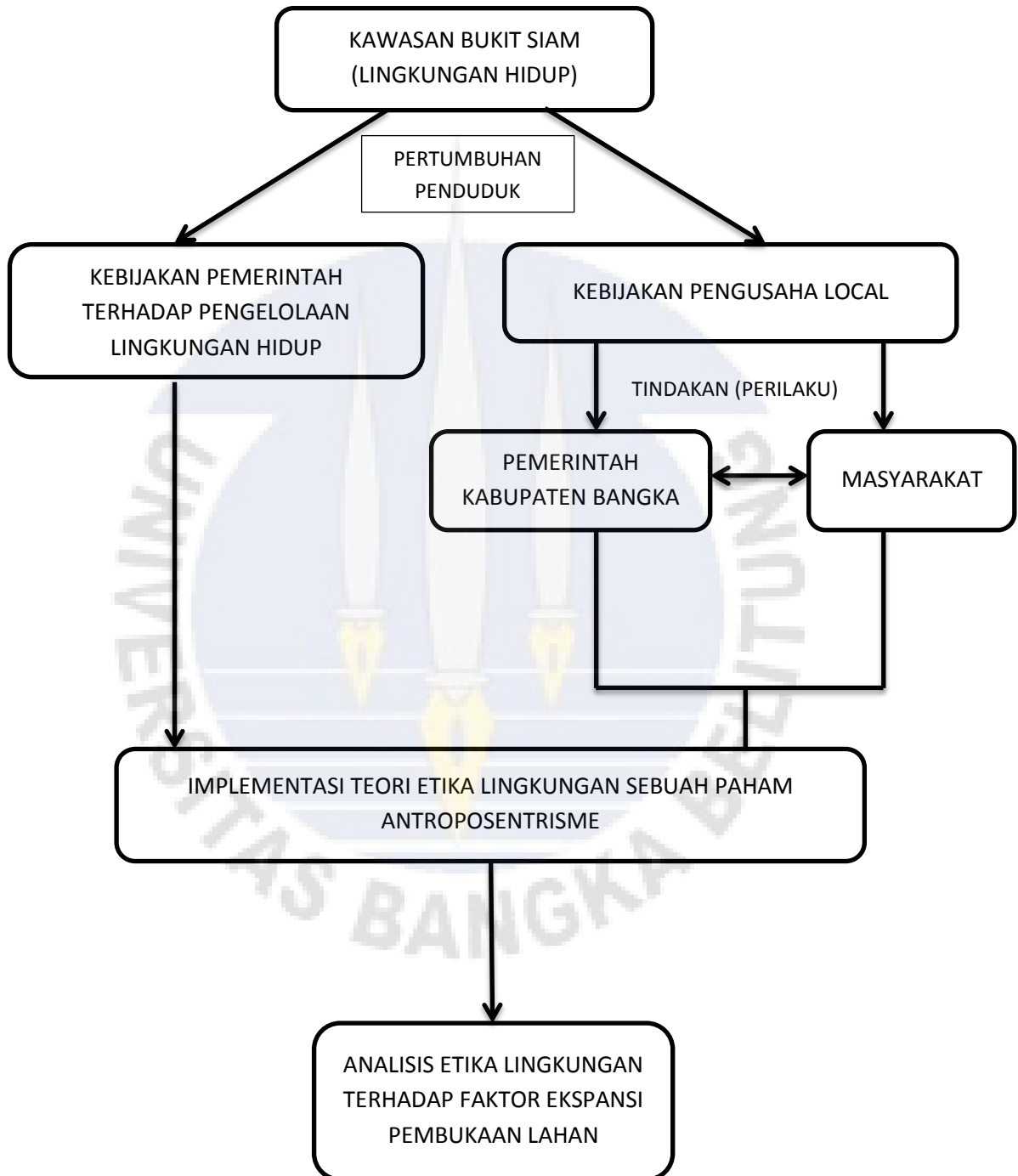
Pandangan Antroposentris digunakan sebagai upaya untuk menjelaskan serta mengkaji bagaimana prinsip etika lingkungan terhadap ekspansi pembukaan lahan di Kawasan Bukit Siam, serta faktor apa yang menjadi dampak ekspansi tersebut. Descartes mengembangkan konsep ilmu alam dengan ilmu pasti dalam pemikiran filsafat yang pada dasarnya upaya manusia sangat rasional dalam mengelola alam semesta (Asmoro Achmadi, 2014: 27). Perilaku manusia diberikan posisi dan argumen moral yang dijadikan hubungan dengan lingkungan. Dasar itu dilihat *prudential and instrumental arguments* Richard Sylvan dan David Bennett dalam Supriadi (2010: 27) menekankan kesejahteraan manusia tergantung pada kualitas lingkungan. Argumen instrumental disini nilai pada alam hanya sebatas nilai instrumental

bahwa manusia di dorong untuk melestarikan lingkungan demi kepentingan manusia.

Oleh karena itu, dalam model etika lingkungan yang ditawarkan oleh paham antroposentrisme *pertama*, mengabaikan masalah lingkungan menyentuh kepentingan manusia meliputi perilaku yang memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak ada manusia tertentu yang terkena dampak negatifnya. *Kedua*, masalah perubahan kepentingan yang menyentuh kepentingan manusia lainnya yang dimaksudkan pertimbangan moral yang selalu berubah-ubah atas dasar perubahan kepentingan manusia. *Ketiga*, kepentingan manusia jangka pendek, khususnya kepentingan ekonomi. Akibatnya lingkungan hidup selalu dikorbankan demi kepentingan tersebut.



Alur Berpikir



Gambar 1. Alur Berpikir

Berdasarkan gambar tersebut, Kawasan Bukit Siam menjadi fokus dalam penelitian ini, ekspansi lingkungan hidup pada Kawasan Bukit Siam mulai adanya perubahan keadaan lingkungan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Dalam proses kebijakan pengusaha lokal berupaya mementingkan kebutuhan manusia dengan melakukan eksploitasi lahan di sekitaran Bukit Siam yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di daerah tersebut. Hal ini proses tindakan atau perilaku pengusaha lokal dengan pemerintah menjadi unit analisis dalam etika lingkungan. Dengan menggunakan teori etika lingkungan melalui model paham antroposentrisme dalam setiap proses etika manusia sehingga akan terlihat proses pengaruh tindakan ekspansi antara pengusaha lokal dan masyarakat sekitar terhadap kebijakan pemerintah yang bersifat etis atau tidak bagi lingkungan hidup.